

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mun'im, Syaikh, 2011, *Saat Cerai Menjadi Pilihan, Hukum dan Etika Seputar Perceraian*, PT. Aqwam Media Profetika, Solo.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Azhar Bashir, Ahmad, 1999, *Hukum Perkawinan Islam, Ed.1.,Cet.9*, UII Press, Yogyakarta.
- Bahari, Adib, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono Gini + Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dardjowidjojo, Soenjono 2005, *Robohnya Moral Kami*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Darmabrata, Wahyono dan Ahlan Sjarif, Surini, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Djatmika, Sastra dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Faisal, 2015, *Pemaknaan Hukum Progresif, Upaya Mendalam Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Thafa Media, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Mata Padi Presindo, Yogyakarta.
- Hartini, Sri, 2008, *Hukum Kepegawaian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Ny. Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Poerwopoespito, F.X. Oerip S, 2000, *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan, Solusi Melalui Pengembangan Sikap Mental*, Grasindo, Jakarta.
- Proyek Peningkatan Administrasi Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986/1987, *Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Shihab, M. Quraish 1996, *Wawasan Al-Qur'an*, Penerbit Mizan, Bandung.
- Sairin, Weinata 2006, *Gereja, Agama-agama dan Pembangunan Nasional*, Gunung Mulia, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tasmara, K.H. Toto, 2006, *Spiritual Centered Leadership (Kepemimpinan Berbasis Spiritual)*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafik, Jakarta.
- Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum*, 2012, Prestasi Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851*).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890*).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150*).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494*).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050*).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983*

Nomor 13 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 3250).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1990 Nomor 61 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 3424).

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2000 Nomor 198 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2010 Nomor 74 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5135).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2004 Nomor 142 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4450).

Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983.

C. Karya Ilmiah, Jurnal dan Internet

Amar Ma'ruf, 2013, "Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Pejabat (Studi PP No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Andrayati, Tehnis Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010, *Makalah*, Sosialisasi Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Gedung Balai Mufakkat, Kabupaten Berau, tanggal 5 s/d 6 Agustus 2015.

Rina R. Novianti, 2012, "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap proses perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A Dpk)", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012.

Ubay Mulyawan, 2015, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Tahun 2015.

Definisimu.blogspot.co.id, "Definisi disiplin", <http://definisimu.blogspot.co.id/2012/11/definisi-disiplin.html>, diakses tanggal 12/1/2017.

Artikelsiana.com, "kebijakan publik pengertian macam jenis fungsi fungsi", <http://www.artikelsiana.com/2015/06/kebijakan-publik-pengertian-macam-jenis-fungsi-fungsi.html>, diakses tanggal 18/2/2017.